

## **BAB VII**

### **STRATEGI TAHUN 2005-2010**

Strategi merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi yang meliputi penetapan kebijakan, dan program untuk mencapai sasaran dan tujuan.

#### **A. KEBIJAKAN**

Pedoman pelaksanaan tindakan-tindakan secara hati-hati dapat mempertajam arti strategi dan menjadi pedoman bagi keputusan-keputusan dalam suatu arah yang mendukung strategi.

Kebijakan merupakan kumpulan keputusan-keputusan yang:

1. Menentukan secara teliti tentang bagaimana strategi akan dilaksanakan atau dengan kata lain kebijaksanaan merupakan pedoman pelaksanaan tindakan atau kegiatan tertentu.
2. Mengatur suatu mekanisme tindakan lanjutan untuk pelaksanaan pencapaian tujuan.
3. Menciptakan langkah atau prosedur yang mengarah kepada kondisi-kondisi di mana setiap pejabat dan pelaksana di organisasi mengetahui tentang apakah mereka memperoleh dukungan untuk bekerja dan mengimplementasikan keputusan.

Masing-masing sasaran beserta indikator sasaran, target, dan kebijakan yang bertalian dengan sasaran bersangkutan, selengkapnya disajikan sebagai berikut:

**Sasaran 1:** Meningkatnya kualitas SDM aparat.

<b>Indikator Sasaran</b>	<b>Target</b>	<b>Kebijakan</b>
(1)	(2)	(3)
a. Tingkat penyelesaian pelanggaran kedisiplinan pegawai (%)	85,0	Meningkatkan kepatuhan, kualitas, kesejahteraan, dan profesionalisme aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang didukung dengan prasarana dan sarana kerja yang memadai.
b. Aparat yang mendapat penghargaan (%)	20,0	
c. Kepuasan pelayanan administrasi kepegawain (%)	90,0	
d. Pejabat yang memiliki kompetensi (%)	85,0	
e. Proporsi aparat berdasarkan tingkat pendidikan (%)		
▪ SD	1,15	
▪ SMP	2,38	
▪ SLTA	20,49	
▪ D1	0,91	
▪ D2	24,18	
▪ D3/SM	14,39	
▪ D4	0,23	
▪ S1	34,80	
▪ S2	1,47	
f. Aparat yang mendapat diklat (orang)	2.706	
▪ Struktural	1.298	
▪ Fungsional		

**Sasaran 2:** Meningkatnya efisiensi birokrasi.

Indikator Sasaran	Target	Kebijakan
(1)	(2)	(3)
a. Instansi yang telah memiliki dan menerapkan SOP (%)	85,0	Meningkatkan pelayanan masyarakat melalui perancangan struktur organisasi yang ramping, kaya fungsi, fleksibel, dan perancangan regulasi serta penerapan <i>standard operating procedure</i> (SOP).
b. Instansi daerah yang telah menerapkan ISO (instansi)	14	

**Sasaran 3:** Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan.

Indikator Sasaran	Target	Kebijakan
(1)	(2)	(3)
Predikat akuntabilitas pemerintah baik (%)	85,0	Mengefektifkan pengawasan dan memberikan informasi secara terbuka kepada publik tentang kinerja Pemerintah untuk mencegah dan mengurangi praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam penyelenggaraan pemerintahan.

**Sasaran 4:** Meningkatnya tertib administrasi pemerintahan dan kualitas pelayanan masyarakat.

Indikator Sasaran	Target	Kebijakan
(1)	(2)	(3)
a. Berkurangnya ketidakpuasan (komplain) masyarakat (%)	20,0	Merumuskan kebijakan yang disesuaikan dengan permasalahan daerah untuk

Lanjutan tabel sebelumnya.

(1)	(2)	(3)
b. Penanganan pengaduan masyarakat (%)	80,0	lebih meningkatkan pengelolaan administrasi dan pelayanan kepada masyarakat yang cepat, tepat, dan terjangkau, yang didukung adanya sumberdaya manusia dan sarana prasarana yang memadai.
c. Tertib administrasi kependudukan (%)	80,0	

**Sasaran 5:** Meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah.

Indikator Sasaran	Target	Kebijakan
(1)	(2)	(3)
a. Rasio kemandirian keuangan daerah (kontribusi PAD terhadap APBD) (%)	13,74	Meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi keuangan dan kekayaan daerah dan mengupayakan peningkatan penerimaan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah.
a. Tertib administrasi keuangan daerah (%)	95,0	
b. Tertib administrasi kekayaan daerah (%)	80,0	

**Sasaran 6:** Meningkatnya informasi dan komunikasi manajemen pemerintahan dan akses pemanfaatannya.

Indikator Sasaran	Target	Kebijakan
(1)	(2)	(3)
a. Ketersediaan data yang akurat (%)	80,0	Meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana dan sarana kerja, ketersediaan dan akurasi data, proses komunikasi dengan memanfaatkan
b. Banyaknya sistem informasi manajemen yang dimiliki Pemda (jenis)	17,0	

Lanjutan tabel sebelumnya.

(1)	(2)	(3)
-----	-----	-----

c. Peningkatan akses informasi masyarakat (%):		kan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan masyarakat dan pengembangan potensi daerah.
▪ situs Sleman.go.id	80,0	
▪ media internal	75,0	
▪ ketersediaan informasi di media	85,0	
d. Instansi yang memiliki jaringan berbasis komputer (LAN) (%)	100,0	

**Sasaran 7:** Meningkatnya kerjasama daerah.

Indikator Sasaran	Target	Kebijakan
(1)	(2)	(3)
a. Peningkatan intensitas kerjasama (buah)	14	Mendorong kerjasama antar pemerintah daerah, pemerintah dengan swasta dan masyarakat dalam rangka pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
b. Peningkatan efektivitas pelaksanaan kerjasama (%)	60,0	

**Sasaran 8:** Meningkatnya partisipasi masyarakat dan swasta dalam penyusunan perencanaan dan kebijakan daerah.

Indikator Sasaran	Target	Kebijakan
(1)	(2)	(3)
a. Keterlibatan publik dalam perencanaan (%)	80,0	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penentuan kebijakan publik melalui kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah.
b. Perumusan kebijakan yang melibatkan masyarakat (%)	50,0	

**Sasaran 9:** Meningkatnya partisipasi masyarakat dan swasta dalam pengawasan.

Indikator Sasaran	Target	Kebijakan
-------------------	--------	-----------

(1)	(2)	(3)
Kelompok/organisasi/lembaga masyarakat yang dilibatkan dalam melakukan pengawasan kinerja pemerintah (kelompok)	16	Meningkatkan partisipasi <i>stake holders</i> dalam pengawasan agar pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan berjalan lancar dan masyarakat dapat mengukur keberhasilan kinerja pemerintah.

**Sasaran 10:** Meningkatnya partisipasi masyarakat dan swasta dalam pelaksanaan pembangunan.

Indikator Sasaran	Target	Kebijakan
(1)	(2)	(3)
a. Rasio swadaya masyarakat terhadap stimulan pemerintah (kali)	6	Memberi kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat/ lembaga untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan melalui pemberian stimulan dan penerapan Iptek.
b. Peningkatan kegiatan penelitian (%)	25,0	

**Sasaran 11:** Menurunnya kasus pelanggaran hukum.

Indikator Sasaran	Target	Kebijakan
(1)	(2)	(3)
a. Penurunan angka pelanggaran hukum (%)	5,0	Mengembangkan budaya hukum, kesadaran dan ketaatan hukum serta mendorong terlaksananya penegakan supremasi hukum dan HAM.
b. Tingkat penyelesaian pelanggaran hukum (%)	80,0	

**Sasaran 12:** Menurunnya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Indikator Sasaran	Target	Kebijakan
(1)	(2)	(3)

a. Angka kriminalitas (%)	5,0 5,0	Mewujudkan stabilitas daerah yang bebas dari ancaman, hambatan dan gangguan dengan didukung oleh kesadaran swakarsa masyarakat untuk dalam menjaga ketertaman dan ketertiban.
b. Kejadian pekat (PSK, judi, gepeng, miras) (%)	15,0	
c. Peningkatan pelayanan penanganan bencana (%)		

**Sasaran 13:** Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pendapat dan berpolitik.

Indikator Sasaran	Target	Kebijakan
(1)	(2)	(3)
a. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (%)	84,0 84,0	Meningkatkan etika dan moral budaya politik sesuai dengan prinsip demokrasi Pancasila serta menjunjung nilai-nilai hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat dan meningkatkan wawasan kebangsaan.
b. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu DPR, DPD, DPRD (%)	80,0	
c. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan gubernur (%)	85	
d. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah (%)	83	
e. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan lurah desa (%)		

Lanjutan tabel sebelumnya.

(1)	(2)	(3)
f. Tingkat partisipasi ma-syarakat dalam pemilih-an dukuh (%)	88	

**Sasaran 14:** Meningkatnya kualitas dan kuantitas produksi barang dan jasa.

Indikator Sasaran	Target	Kebijakan
(1)	(2)	(3)
a. Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) sektor pertanian (%)	3,06	Membangun sektor pertanian ke arah agribisnis dengan memperkuat sistem pertanian dalam arti luas.
b. Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) sektor industri (%)	7,53	1) Mengembangkan industri kecil, UMKM khususnya yang berorientasi ekspor. 2) Meningkatkan penguasaan, pengembangan dan penerapan lptek dalam usaha perekonomian terutama UMKM. 3) Mengembangkan industri yang menghasilkan input bagi sektor pertanian dan pengolahan pasca panen (pembibitan, pembenihan, rekayasa biologi, pengembangan makanan olahan).
c. Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) sektor perdagangan, hotel, dan restoran (%)	3,48	Meningkatkan peran sektor perdagangan, pariwisata, dan koperasi dengan mengembangkan potensi dan peranserta masyarakat.



Lanjutan tabel sebelumnya.

(1)	(2)	(3)
d. Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) sektor jasa-jasa (%)	2,23	
e. Peningkatan bantuan penguatan modal koperasi (%)	37,0	

**Sasaran 15:** Meningkatkan pemasaran.

Indikator Sasaran	Target	Kebijakan
(1)	(2)	(3)
Peningkatan nilai ekspor (%)	6,01	Meningkatkan dan membangun sarana perdagangan dan sistem distribusi yang baik untuk input maupun output industri.

**Sasaran 16:** Meningkatnya investasi.

Indikator Sasaran	Target	Kebijakan
(1)	(2)	(3)
Pertumbuhan nilai investasi (%)	5,21	Meningkatkan kualitas pelayanan investasi terutama dalam pelayanan perijinan.

**Sasaran 17:** Meningkatkan peran serta masyarakat dan swasta dalam kewirausahaan.

Indikator Sasaran	Target	Kebijakan
(1)	(2)	(3)
a. Perluasan lapangan kerja (%)	4,36	Meningkatkan peranserta masyarakat dan swasta dalam

Lanjutan tabel sebelumnya.

(1)	(2)	(3)
b. PDRB per kapita (juta Rp/jiwa)	9,86	menciptakan lapangan kerja.

**Sasaran 18:** Meningkatnya kualitas prasarana dan sarana perhubungan.

Indikator Sasaran	Target	Kebijakan
(1)	(2)	(3)
a. Jalan dengan kondisi baik (%)	34,0	Menjaga dan meningkatkan kualitas prasarana dan sarana perhubungan dengan memperhatikan perkembangan wilayah dan tata ruang.
b. Jembatan dengan kondisi baik (%)	62,0	
c. Sarana perhubungan dengan kondisi baik (%)	78,0	
d. Banyaknya satuan sambungan telepon (SST)	69.531	
e. Banyaknya wartel, war-net (buah)	1.179	
f. Rata-rata daya angkut angkutan umum (orang/ kendaraan)	7,75	

**Sasaran 19:** Meningkatnya kualitas prasarana dan sarana pengairan.

Indikator Sasaran	Target	Kebijakan
(1)	(2)	(3)
a. Bendung dengan kondisi baik (%)	54,0	Menjaga dan meningkatkan kualitas prasarana dan sarana pengairan dan memperhatikan konservasi sumberdaya air melalui peningkatan peran serta masyarakat.
b. Saluran irigasi dengan kondisi baik (%)	80,0	
c. Banyaknya embung (buah)	8	

Lanjutan tabel sebelumnya.

(1)	(2)	(3)
d. Jaringan irigasi air tanah dengan kondisi baik (%)	82,0	
e. Banyaknya mata air tertangani (buah)	45,0	

**Sasaran 20:** Meningkatnya kualitas prasarana dan sarana perumahan dan permukiman.

Indikator Sasaran	Target	Kebijakan
(1)	(2)	(3)
a. Rumah layak huni (%)	98,0	Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana perumahan dan permukiman melalui peningkatan peran serta masyarakat dan tetap mempertahankan fungsi lingkungan.
b. Banyaknya kawasan kumuh yang tertangani (%)	15,0	
c. Banyaknya sambungan rumah air bersih (SRT)	19.300	
d. Banyaknya KK yang telah memperoleh aliran listrik (%)	93,2	
e. Jalan poros desa dengan kondisi baik (%)	37,0	
f. Daerah genangan air hujan (titik)	42	
g. KK rawan air bersih (KK)	10.400	
h. Sarpras PBA baik (%)	56,0	

**Sasaran 21:** Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.

<b>Indikator Sasaran</b>	<b>Target</b>	<b>Kebijakan</b>
(1)	(2)	(3)
a. Kualitas air sungai Code, Gadjah Wong, Winongo (kelas)	II	Mewujudkan kualitas lingkungan yang terjaga dan berkelanjutan dengan peran serta masyarakat.
b. Indeks standar pencemaran udara (kategori baik)	0-50	
c. Cakupan layanan sampah (%)		
▪ Perkotaan	60,0	
▪ Perdesaan	25,0	
	83,0	
d. Rasio sampah terangkut terhadap produksi sampah (%)	10	
e. Perusahaan yang memiliki IPAL (%)	10,0	
f. Penurunan kasus pencemaran lingkungan (%)	80,0	
g. Perusahaan yang memiliki dokumen UKL, UPL, dan Amdal (%)		

**Sasaran 22:** Meningkatnya kualitas pengelolaan sumber daya alam.

<b>Indikator Sasaran</b>	<b>Target</b>	<b>Kebijakan</b>
(1)	(2)	(3)

a.Luas hutan rakyat (ha)	3.410	Mewujudkan kualitas sumber daya alam yang lestari dan berkelanjutan dengan peran serta masyarakat dan swasta.
b.Konservasi lahan (%)	550,0	
c.Hutan & taman kota (ha)	1,7	
d.Luas lahan kritis (ha)	3.920	
e.Banyaknya mata air yang terlindungi (buah)	40,0	
f.Pemanfaatan energi terbarukan (unit):		

Lanjutan tabel sebelumnya.

(1)	(2)	(3)
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ PLTS</li> <li>▪ PLTMH</li> <li>▪ Biogas</li> </ul>	145 6 52	
g.Luas lahan pertanian organik (%)	30,0	

### Sasaran 23: Meningkatnya penataan ruang.

Indikator Sasaran	Target	Kebijakan
(1)	(2)	(3)
a. Luas yang memiliki RDTR (%)	48,1	Meningkatkan kualitas tata ruang yang efektif dan efisien dengan peran serta masyarakat dan swasta.
b. Luas yang memiliki RTBL (%)	0,5	
c. Tertib administrasi per-tanahan (%)	66,0	
d. Tertib pemanfaatan per-tanahan (%)	83,0	

### Sasaran 24: Meningkatnya kualitas pendidikan.

Indikator Sasaran	Target	Kebijakan
(1)	(2)	(3)

a. Angka melek huruf (%)	95,0	Meningkatkan kualitas penyelenggara pendidikan, pemerataan pengembangan kurikulum, penataan sistem pembiayaan dan peningkatan peran serta masyarakat.
b. Rata-rata lama sekolah (tahun)	12,0	

**Sasaran 25:** Meningkatnya derajat kesehatan.

Indikator Sasaran	Target	Kebijakan
(1)	(2)	(3)
a.Usia harapan hidup (tahun)	74,6	Meningkatkan manajemen mutu pelayanan kesehatan secara merata dan terjangkau serta peningkatan kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat.
b.Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup (AKB)	5,0	
c.Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup (AKI)	61,84	
d.Balita dengan gizi buruk (%)	0,732	

**Sasaran 26:** Meningkatnya keluarga sejahtera.

Indikator Sasaran	Target	Kebijakan
(1)	(2)	(3)
a. Laju pertumbuhan penduduk (%)	1,18	Pengendalian pertumbuhan penduduk dengan meningkatkan pemberdayaan dan jejaring pelayanan KB untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.
b. Tingkat kesejahteraan keluarga (%)	91,0	
▪ Keluarga Sejahtera		

**Sasaran 27:** Meningkatnya pembinaan dan pemberdayaan generasi muda dan olah raga.

Indikator Sasaran	Target	Kebijakan
(1)	(2)	(3)
a. Ormas kepemudaan dan cabang olah raga (%)	75,0	Meningkatkan potensi generasi muda dengan mengembangkan kesempatan pen-

Lanjutan tabel sebelumnya.

(1)	(2)	(3)
-----	-----	-----

b. Peningkatan peran dan prestasi generasi muda (%)	75,0	didikan ketrampilan, kewira-usahaan, prestasi olah raga, kebugaran dan kesegaran jasmani masyarakat dengan fasilitas prasarana olah raga yang memadai serta melindungi generasi muda dari penyimpangan nilai-nilai moral.
c. Peningkatan prestasi dan pemberdayaan olah raga (%)	75,0	

**Sasaran 28:** Meningkatnya kesejahteraan pekerja.

Indikator Sasaran	Target	Kebijakan
(1)	(2)	(3)
a.Kesesuaian upah dengan UMP (%)	80,0	Meningkatkan kesempatan kerja melalui pengembangan informasi dan bursa kerja serta mekanisme ketenagakerjaan yang mengarah pada kesejahteraan pekerja.
b.Penanganan perselisihan perburuhan (%)	96,0	
c.Keselamatan Kesehatan Kerja (K3) (%)	95,0	
d.Penempatan tenaga kerja terdaftar (%)	30,0	

**Sasaran 29:** Meningkatnya kompetensi tenaga kerja.

Indikator Sasaran	Target	Kebijakan
(1)	(2)	(3)
Penyerapan lulusan pasca pendidikan dan pelatihan (%)	55,0	Meningkatkan daya saing, standar mutu tenaga kerja, kualitas pendidikan ketrampilan dan pelatihan tenaga kerja.

**Sasaran 30:** Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas hidup PMKS.

Indikator Sasaran	Target	Kebijakan
(1)	(2)	(3)



a. Proporsi penyanggand masalah kesejahteraan sosial (PMKS) terhadap banyaknya penduduk (%)	6,0	Meningkatkan kualitas hidup PMKS melalui peningkatan kualitas pelayanan, pemberdayaan PMKS, uoaya pencegahan dan penaggulangan penyalahgunaan Napza, dan peran aktif masyarakat dalam pe-nyelenggaraan kesejahteraan sosial.
b. Proporsi KK miskin terhadap banyaknya KK (%)	25,4	
c. Penurunan kasus penyalahgunaan Napza (%)	10,0	

**Sasaran 31:** Menurunnya kesenjangan antara perempuan dan laki-laki.

Indikator Sasaran	Target	Kebijakan
(1)	(2)	(3)
Indeks Pembangunan Gender (%)	67,7	Meningkatkan kesadaran terhadap keadilan gender melalui pemerataan, akses, dan tingkat partisipasi aktif.

**Sasaran 32:** Menurunnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Indikator Sasaran	Target	Kebijakan
(1)	(2)	(3)
Proporsi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak (%)	0,01	Meningkatkan kesadaran masyarakat akan anti kekerasan terhadap perempuan dan anak.

**Sasaran 33:** Meningkatnya kerukunan masyarakat.

Indikator Sasaran	Target	Kebijakan
(1)	(2)	(3)

Konflik suku, agama, ras, antar golongan (SARA)	0	Membangun kualitas beragama melalui peningkatan kualitas pelayanan, pemahaman agama dan kehidupan beragama serta nilai-nilai wawasan kebangsaan.
---	---	--

**Sasaran 34:** Meningkatnya pelestarian dan pengembangan kekayaan budaya.

Indikator Sasaran	Target	Kebijakan
(1)	(2)	(3)
Pengelolaan kekayaan dan peningkatan keragaman serta pengembangan nilai-nilai budaya (%)	75,0	Mengembangkan kebudayaan yang berdasarkan nilai-nilai luhur melalui peran aktif masyarakat dan swasta dalam pelestarian nilai-nilai budaya.

## B. PROGRAM

Program adalah sebagai penentuan tindakan untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi, sehingga program merupakan suatu jenis rencana yang disusun lebih konkrit, di dalamnya terkandung sekumpulan kegiatan yang berbeda-beda, akan tetapi menuju pada satu tujuan yang sama.

**Misi 1:** Menjaga Terselenggaranya Tata Pemerintahan yang Baik.

Dalam rangka tetap menjaga terselenggaranya tata pemerintahan yang baik, pemerintah daerah berupaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan melaksanakan fungsi pelayanan umum pemerintahan, fungsi

keamanan dan ketertiban melalui program-program sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Pengelolaan SDM Aparatur.
2. Program Peningkatan Kesejahteraan Aparat.
3. Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur dan Pejabat Negara.
4. Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan.
5. Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah.
6. Program Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah.
7. Program Pengembangan Kualitas Kebijakan Publik.
8. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
9. Program Peningkatan Administrasi Pemerintahan.
10. Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber PAD.
11. Program Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah.
12. Program Pengelolaan Data, Informasi, dan Arsip Daerah.
13. Program Pengembangan Komunikasi dan Telematika.
14. Program Peningkatan Kerjasama.
15. Program Peningkatan Perencanaan Partisipatif.

16. Program Peningkatan Kualitas Pengawasan Masyarakat.
17. Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan dan Penguatan Kelembagaan.
18. Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IpTek).
19. Program Peningkatan Pelayanan dan Bantuan Hukum.
20. Program Pembentukan Produk Hukum, Penegakan Hukum, dan Hak Azasi Manusia (HAM).
21. Program Peningkatan Keamanan dan Ketertiban.
22. Program Pengembangan Budaya Demokratis.
23. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan.

**Misi 2:** Menjaga Keberlanjutan Kegiatan Perekonomian Masyarakat. Dalam rangka tetap menjaga keberlanjutan kegiatan perekonomian masyarakat, pemerintah daerah berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan melaksanakan fungsi ekonomi, pariwisata, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, melalui program-program sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan.
2. Program Pengembangan Agribisnis.
3. Program Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Teknologi Petani.

4. Program Pengembangan Usaha Industri dan UMKM.
5. Program Penciptaan Iklim Usaha yang Kondusif Bagi UMKM.
6. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM.
7. Program Peningkatan Kemampuan Rekayasa dan Pemanfaatan Teknologi Dalam Industri.
8. Program Pengembangan Obyek dan Daya Tarik Wisata.
9. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata.
10. Program Pembangunan Sarana Perdagangan dan Sistem Distribusi.
11. Pengembangan Koperasi.
12. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor.
13. Program Peningkatan Iklim Investasi yang Kondusif.
14. Program Peningkatan Promosi Investasi.
15. Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja.
16. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja.
17. Program Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
18. Program Peningkatan dan Pemeliharaan Fasilitas Lalu Lintas.

19. Program Peningkatan Manajemen Lalu Lintas.
20. Program Pengembangan dan Pemerataan Telekomunikasi.
21. Program Peningkatan dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pengairan.
22. Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Perumahan dan Permukiman.
23. Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Fasilitas Umum.
24. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup.
25. Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Hidup.
26. Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan Sumberdaya Alam.
27. Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan BBGC.
28. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Sumberdaya Alam.
29. Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam.
30. Program Peningkatan Pemanfaatan Energi Terbarukan.
31. Program Perencanaan Tata Ruang.
32. Program Pengendalian Tata Ruang.
33. Program Peningkatan Tertib Penguasaan Tanah.

### 34. Program Tertib Pemanfaatan dan Penggunaan Tanah.

**Misi 3:** Meningkatkan Kualitas Hidup dan Kehidupan Masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat, pemerintah daerah berupaya untuk meningkatkan kualitas penduduk, perlindungan dan kesejahteraan sosial dengan melaksanakan fungsi kesehatan, pendidikan, budaya dan perlindungan sosial, melalui program-program sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar dan Menengah.
2. Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Non Formal.
3. Program Penelitian dan Pengembangan Pendidikan.
4. Program Peningkatan Manajemen Pendidikan.
5. Program Peningkatan Manajemen Pembangunan Kesehatan.
6. Program Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat.
7. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan.
8. Program Peningkatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan.
9. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana dan Manajemen Kependudukan.
10. Program Peningkatan Pemberdayaan dan Ketahanan Keluarga.

11. Program Peningkatan Pembinaan Generasi Muda.
12. Program Peningkatan Kualitas Prasarana dan Sarana Olah Raga.
13. Program Peningkatan Kualitas Pembinaan Olah Raga.
14. Program Peningkatan Informasi Kerja dan Kualitas Penempatan Tenaga Kerja.
15. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja.
16. Program Peningkatan Kualitas Calon Tenaga Kerja dan Lembaga Pelatihan Kerja.
17. Program Peningkatan Kualitas Penanganan Permasalahan Sosial.
18. Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Usaha Kesejahteraan Sosial.
19. Program Peningkatan Kualitas Data Keluarga Sejahtera.
20. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Napza.
21. Program Peningkatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender.
22. Program Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak.
23. Program Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat.
24. Program Peningkatan Kualitas Keagamaan.



## 25. Program Peningkatan Pengelolaan Nilai-nilai Luhur Budaya.